



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU**
SUB BAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN

KLIPING MEDIA 2019

KABUPATEN MUKOMUKO

RABU, 23 OKTOBER 2019

SUMBER BERITA

| | | |
|---|-------------------|-----------------|
| | RAKYAT BENGKULU | MEDIA INDONESIA |
| | BENGKULU EKSPRESS | KOMPAS |
| X | RADAR BENGKULU | |

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

**Pengembalian Dugaan KN Rendah,
Inspektorat Mukomuko Libatkan Jaksa**

RBI, MUKOMUKO - Inspektur Inspektorat Kabupaten Mukomuko, Sukiman, SP menyatakan, pengembalian dugaan kerugian negara (KN) hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada APBD Mukomuko terbilang rendah. Katanya, dari total temuan audit BPK total pengembalian belum mencapai 20 persen. "20 persen belum. Belum sampai. Masih di bawah itu," ungkapnya ketika dikonfirmasi RADAR BENGKULU Selasa (22/10). Katanya, Inspektorat telah menyurati pihak-pihak

yang berkewajiban mengembalikan dugaan KN hasil audit BPK. Terhitung 60 hari setelah menerima surat dari Inspektorat, seharusnya pihak yang bersangkutan telah mengembalikan dugaan KN sesuai hasil audit. "Suratnya sudah lama kita kirim ke masing-masing yang bersangkutan. Kita masih menunggu sampai 60 hari sejak mereka menerima surat, ini menyisakan beberapa hari lagi," ujarnya.
Ditanya, OPD mana saja yang ada temuan BPK pada APBD 2018, Su-

kiman mengatakan kurang hafal. Termasuk total dugaan KN hasil Audit BPK ia juga mengaku kurang hafal. Namun ia memastikan selain OPD, ada pihak swasta atau rekanan pemerintah yang juga diminta mengembalikan KN. Ditegaskan Sukiman, jika sampai waktu yang telah ditentukan, maka akan dibentuk majelis Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang diketuai langsung oleh Sekda. Majelis ini nanti, jelas Sukiman, akan menetapkan penanggungjawab mutlak. "Penanggungjawab mutlak

ini, personal orang. Bukan lagi OPD atau lembaga. Jadi, kalau sudah ditetapkan penanggungjawab mutlak, yang bertanggungjawab personal yang ditetapkan itu," terangnya. Jika dengan langkah tersebut pengembalian masih juga rendah, sambung Sukiman, bukan tidak mungkin pihaknya akan melibatkan Pengacara Negara untuk melakukan penagihan. "Pengacara inikan jaksa. Mungkin saja nanti akan melibatkan Pengacara Negara untuk menagih KN," pungkas Sukiman. (sam)